

IDENTIFIKASI MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF MASYARAKAT LOKAL DI CALON KAWASAN KONSERVASI TELUK DEPAPRE, JAYAPURA

Yunus P. Paulangan¹

ypaulangan@gmail.com

Muh. Arsyad Al. Amin²

arsyadalamain@pksplipb.or.id

Yudi Wahyudin³

yudi_iasd@yahoo.com

Taryono Kodiran⁴

tkodiran@yahoo.com

¹ Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Cenderawasih; ² PKSPL IPB Bogor; ³ Program Studi Ekonomi Kelautan Tropis IPB Bogor;

⁴ Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor

Abstract: Depapre Bay has been designated as a strategic area of national development support in Papua Province and will also be proposed as reserves of marine protected areas ascertained to have an impact on the community, especially local communities around the area. The purpose of this research is to identify, define and formulate of development strategies of alternative livelihood. This research uses four approaches: literature study, observation, survey and Participatory Rural Appraisal (PRA). Data analysis method used is descriptive analysis, Coastal Livelihood System analysis, Rating Scale analysis and business feasibility analysis. Based on rating scale analysis, three alternative identified as alternative livelihoods were developed, ie smoke fish making business, cottage rental and fishing with the rumpon. Then the result of financial feasibility analysis from the ratio of income to total cost (BCR) from three alternative livelihoods, hence the highest income ratio that is smoke fish business (3,70), then cottage rental business (2.64), and fishing with the rumpon (1.62). Based on the Return of Investment (ROI), the smoked fish business is more efficient ie (90%), cottage rental (85%), and rumpon (58%). Based on Payback Period (PP), which is based on faster rate of return of investment in one year, the fastest business of smoked fish (0.04), cottage rental business (2.17), and fishing business with rumpon (2.32). Given the existing constraints in the development of livelihood enterprises in particular, the availability of raw materials, capital, and interest and mastery of technology is still low then need a strategy of training and assistance by relevant stakeholders.

Keywords : Alternative Livelihoods, Local Communities, Depapre Bay

PENDAHULUAN

Teluk Depapre yang berada dalam Ekoregion Laut 16 (berdasarkan jejaring kawasan Konservasi Perairan) dan atau WPP RI 717 (Wilayah Pengelolaan Perikanan), pada tahun 2015 telah diusulkan sebagai Calon Kawasan Konservasi Perairan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Selain itu, kawasan Teluk Depapre yang juga dikenal dengan kawasan Tanah Merah juga telah ditetapkan sebagai kawasan strategis penunjang pembangunan di Provinsi Papua melalui Perpres RI No. 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Salah satu infrastruktur penunjang tersebut, yakni pembangunan dermaga penumpang dan pelabuhan peti kemas yang mulai dibangun pada tahun 2015. Penetapan kawasan strategis tersebut telah memicu perubahan di kawasan tersebut, baik dari aspek lingkungan maupun dari aspek komunitas yang mendiami kawasan sekitarnya. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat lokal tetapi juga menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya yang ada. Masuknya masyarakat pendatang dapat memicu intensitas pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan sumber daya, bahkan juga berdampak pada luntarnya nilai-nilai budaya masyarakat lokal serta luntarnya kesadaran tentang pelestarian sumber daya. Sementara itu, jika kawasan tersebut juga telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan maka secara tidak langsung memberikan konsekuensi baik positif maupun negatif terhadap bentuk dan aktivitas pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut oleh masyarakat di sekitar kawasan.

Masyarakat lokal di kawasan Teluk Depapre memiliki pendapatan yang dapat dikategorikan masih rendah dengan teknologi pemanfaatan yang cukup sederhana. Seiring dengan terbukanya kawasan Teluk Depapre, masyarakat lokal dipastikan akan semakin tersisih dengan keterbatasan teknologi dan minimnya keterampilan yang dimiliki dalam memanfaatkan sumberdaya, bahkan dapat memicu penggunaan alat tangkap yang merusak. Di satu sisi, dengan pengembangan kawasan nantinya menjadi kawasan konservasi tidak serta-merta diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat lokal karena berbagai kepentingan. Kondisi tersebut dapat memicu konflik dan persaingan pemanfaatan sumber

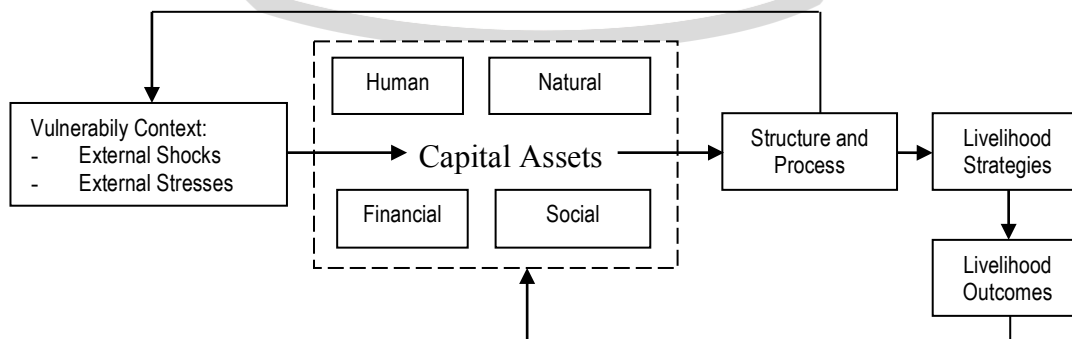
daya yang dapat memperparah kerusakan sumber daya. Selain itu, menurut Noveria dan Malamassam (2015), penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil dan pesisir, mata pencaharian di bidang perikanan tangkap merupakan sumber ekonomi rumah tangga yang paling utama tidak dapat menjamin ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kondisi rentannya sektor perikanan tangkap terhadap berbagai ancaman, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan. Situasi ini umumnya diperparah dengan kondisi tingginya tekanan penduduk di tengah keterbatasan sumberdaya lahan di wilayah pesisir.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat lokal adalah penciptaan lapangan kerja yang baru melalui identifikasi mata pencaharian alternatif dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan sumberdaya. Mata pencaharian alternatif dapat diartikan sebagai mata pencaharian di luar kegiatan ekonomi tradisional atau kegiatan ekonomi yang telah umum dilakukan sebelumnya oleh penduduk di suatu wilayah (Ireland, 2004), dilakukan dengan diversifikasi pekerjaan yang sekaligus juga bertujuan untuk mengurangi risiko dan kerentanan terkait dengan kemiskinan (Brugere *et.al.*, 2008). Selain itu, sebuah konservasi (hutan) tidak dapat dicapai hanya dengan memberi kompensasi kepada penduduk setempat tergantung pada sumber daya hutan untuk jasa lingkungan hutan mereka yang diberikan kepada masyarakat dunia - atau dengan memberi kompensasi atas pembatasan pemanfaatan (Lax and Krug, 2013).

Dengan demikian, maka tujuan pengelolaan kawasan konservasi dan penetapan sebagai kawasan strategis nasional dapat tercapai, yakni mempertahankan biodiversity dengan memastikan pemanfaatan sumberdaya dan jasa ekosistem secara berkelanjutan, dan meningkatnya kesejahteraan manusia, yakni khususnya masyarakat local sebagai pemanfaat sumberdaya. Beberapa hal yang mendukung suksesnya penciptaan dan pemberdayaan kegiatan mata pencaharian alternatif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Tobey (2004), yakni 1) bimbingan teknis dan manajemen, baik dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan lapangan; dan 2) pemahaman yang menyeluruh terhadap beberapa komponen penting dalam penciptaan usaha ekonomi produktif juga diperlukan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan mata pencaharian alternatif. Kemudian Noveria dan Malamassam (2015), lebih lanjut menyebutkan bahwa hal utama yang perlu disadari sebelum melakukan inisiasi kegiatan mata pencaharian alternatif adalah pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di wilayah pesisir, termasuk kebiasaan dan pandangan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penciptaan mata pencaharian alternatif.

Kusnadi (2008) yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan usaha alternative, yaitu 1) jenis-jenis mata pencaharian alternatif yang bergantung pada struktur dan potensi sumber daya ekonomi local yang tersedia, baik di kawasan pesisir maupun dengan mendayagunakan potensi sumberdaya laut, 2) penentuan jenis usaha sebagai mata pencaharian alternatif akan berpengaruh terhadap pilihan teknologi dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung usaha tersebut. Sebaiknya, jenis teknologi dan peralatan yang digunakan adalah teknologi tepat guna, dan 3) jaringan pemasaran yang luas dan jauh untuk menjamin keberlanjutan usaha dari mata pencaharian alternatif.

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan *Coastal Livelihood System Analysis* (CLSA), yang merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi mata pencaharian yang dapat dan layak dikembangkan untuk masyarakat pesisir (Adrianto, 2005), dalam kerangka pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan dimana aspek sistem alam (ekosistem) dan sistem manusia tidak dapat dipisahkan. Dalam (Chambers 1994), ide dasar dari pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan didasarkan pada lima pilar, yang lima aset mata pencaharian: modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, dan keuangan modal. Konsep CLSA secara diagramatik digambarkan pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1. Skema *Coastal Livelihood System Analysis* (Diadopsi dari Adrianto, 2005)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat local di Teluk Depapre Kabupaten Jayapura dengan pemahaman kondisi sosial ekonomi masyarakat local serta merumuskan strategi pengembangannya.

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan selama 12 bulan. Pengambilan data primer di lapangan dilakukan sebanyak 2 kali selama 1 minggu (6 hari), yakni pada Oktober 2017 dan November 2017. Penelitian ini dilakukan di kawasan Teluk Depapre, yakni di Kampung Waiya, Kampung Kendate, Tablanusu dan Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Kampung-kampung (desa) tersebut terpilih dengan pertimbangan merupakan kampung (desa) yang sudah lama ditinggali, dan merepresentasikan keberadaan suku di kawasan Teluk Depapre yang terkait dengan hak ulayat serta memiliki peluang terdampak akibat penetapan kawasan baik sebagai kawasan konservasi maupun penetapan kawasan strategis pembangunan infrastruktur pelabuhan.

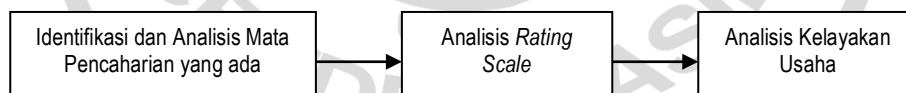
B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan 3 pendekatan, yakni: studi literatur, observasi dan survey dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Studi kepustakaan diperlukan untuk menghimpun data awal sebagai referensi yang diperlukan, sedangkan Metode Survei digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari informasi secara faktual, baik mengenai institusi, sosial budaya, ekonomi maupun politik (Nazir, 1998). Tujuan dari penggunaan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) adalah pengembangan kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaan mereka sendiri dan melakukan perencanaan serta kegiatan aksi. Menurut Chambers (1994) PRA sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan dan metode yang memungkinkan orang lokal untuk membawa pengetahuan dan persepsi mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan metode PRA dalam penelitian menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok yang terarah untuk menggali dan menganalisis permasalahan, kebutuhan dan peluang, pola pikir dan kesadaran masyarakat dari pola pemanfaatan sumber daya alam, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam pengawasan suatu kegiatan, serta keinginan dan peran masyarakat dalam lembaga pengelolaan kawasan konservasi di Teluk Depapre.

Data terdiri bersumber dari data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

C. Teknik Analisa Data

Alur analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur dan Analisis yang Digunakan

Metode analisis yang digunakan adalah:

- **Analisis Deskriptif.** Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan potensi dan keragaan wilayah yang termasuk aspek-aspek berikut: kualitas lingkungan dan status kawasan konservasi, potensi sumberdaya pesisir, kondisi ekonomi masyarakat dan profil sosial kelembagaan masyarakat. Analisis yang dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. Hasil yang akan dicapai dari analisis ini adalah overview atas profil dan potensi wilayah, isu strategis dalam pengelolaan pesisir dan laut di wilayah ini serta pengembangan ekonomi di sekitar Teluk Depapre.
- **Analisis Rating Scale.** Analisis *Rating Scale* dikembangkan berdasarkan pertimbangan empat variabel teknis sebagai "kendala" yang meliputi kepentingan umum, ketersediaan bahan baku dari sumber daya alam lokal, ketersediaan tenaga kerja dan peluang pasar. Penilaian variabel ini dilakukan dengan sistem skala penilaian (*Rating Scale*) (Brown dan Terry, 1990), dengan memberikan skor pada masing-masing variabel tersebut. *Rating scale* diperoleh dari penjumlahan skor komponen penilaian dikalikan bobotnya. Komponen dan bobot setiap komponen adalah ketersediaan bahan baku (40%), minat masyarakat (20%), ketersediaan tenaga kerja (10%),

penguasaan teknologi (10%) dan ketersediaan pasar (20%). Skor 4 berarti kategori sangat bagus, skor 3 bagus, skor 2 cukup bagus, dan skor 1 buruk. Setiap ranking masing-masing jenis bisnis alternatif yang akan dikembangkan ditentukan oleh total skor dan skor rata-rata (Tabel 1). Mata Pencaharian Alternatif Prioritas dipilih berdasarkan Total Skor yang diperoleh dari penjumlahan perkalian skor setiap komponen dan bobotnya.

Tabel 1. Prioritisasi Mata Pencaharian Alternative berbasis Nilai Total.

Rentang Skor Total	Kriteria	Kategori	Prioritas
>326	Sangat potensial	<i>Very Good</i>	1
251-325	Cukup Potensial	<i>Good</i>	2
176-250	Kurang Potensial	<i>Fair</i>	3
100-175	Tidak Potensial	<i>Poor</i>	4

- **Analisis Kelayakan Usaha untuk menghitung aspek finansial yang dapat diperoleh dari setiap usulan kegiatan mata pencaharian alternatif.** Analisis kelayakan usaha menurut Kadariah and Gray (1978), analisis ini dilakukan dengan menggunakan Benefit Cost of Ratio (BCR), Return on Investment (ROI) dan Payback Period of Capital (PP). Formulasinya sebagai berikut:
 - a. *Benefit Cost of Ratio (B/C Ratio* atau BCR). Rasio B/C adalah rasio pendapatan terhadap total biaya, dengan rumus:
$$B/C = \frac{\text{Penerimaan}}{\text{Biaya Total}}$$
Kriteria: $B/C > 1$ (Usaha dapat diteruskan / *feasible*); $B/C < 1$ (Usaha tidak dapat lanjut / *not feasible*); $B/C = 0$ (*Break Event Point*).
 - b. *Return of Investment (ROI)*: ROI adalah efisiensi penggunaan investasi yang dihitung dengan rumus:
$$ROI = \frac{\text{Profit}}{\text{Investment}} \times 100\%$$
Kriteria: Semakin besar ROI, semakin efisien penggunaan investasi atau dengan kata lain satu proses produksi dapat mengembalikan investasi ROI.
 - c. *Payback Period of Capital (PP)*: PP menunjukkan laba atas investasi yang dihitung dengan rumus:
$$PP = \frac{\text{Investment}}{\text{Profit}} \times 1 \text{ year}$$
Kriteria: Semakin kecil PP, semakin baik karena tingkat pengembalian investasi yang lebih cepat dalam satu tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat asli di kawasan Teluk Depapre yang mendiami kampung-kampung di sekitar kawasan diantara suku Tefra, suku Moi, Suku Yokari, dan Suku Yewena (Yarisetouw, 2009). Suku Moi mendiami Kampung Kendate, suku Tefra mendiami Kampung Tablanusu, Tablasupa dan Waiya. Suku Tefraa atau juga sering disebut suku Tabla merupakan suku laut sehingga kampung Waiya, Tablanusu dan Tablasupa umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan suku Moi merupakan suku darat, dimana mata pencahariannya umumnya sebagai petani dengan berkebun, namun berdasarkan pengamatan beberapa kepala keluarga yang sudah menekuni mata pencaharian sebagai penangkap ikan. Selain nelayan dan berkebun, berdasarkan FGD dan wawancara mata pencaharian alternatif yang dikembangkan oleh masyarakat Teluk Depapre, antara lain:

a. Wisata Bahari

Aktivitas wisata bahari yang telah berjalan selama ini di kawasan Teluk Depapre, yakni dikategorikan sebagai wisata bahari skala kecil. Kegiatan wisata yang dilakukan terdiri dari snorkling, berenang, berjemur di pasir. Sarana dan prasarana penunjang aktivitas wisata berupa pondok wisata dan penyewaan perahu bagi wisatawan. Aktivitas wisata selam belum dikelola oleh masyarakat. Khusus untuk wisata selam, mulai diminati oleh wisatawan lokal dari Kota

Jayapura namun sarana dan prasarana berupa alat selam belum tersedia di lokasi kajian. Wisata memancing cukup menjanjikan untuk dikelola oleh masyarakat di Teluk Depapre dimana kedatangan wisatawan pemancing cukup banyak terutama pada hari-hari libur.

b. Budidaya Laut

Beberapa komoditas yang mulai dibudidayakan dalam keramba jaring apung (KJA) di Kampung Tablanusu, antara lain: pembesaran ikan bandeng dan ikan nila. Benih berasal dari Koya Kota Jayapura bahkan didatangkan dari luar, seperti dari Manado, dan Makasar. Beberapa kendala budidaya di Papua khususnya di Teluk Depapre, antara lain: terbatasnya motivasi dan kemampuan teknologi masyarakat (lokal), kendala bibit, biaya produksi cukup tinggi, serta pasar yang masih terbatas.

c. Pengolahan hasil laut untuk pendukung pelabuhan

Pengolahan hasil laut berupa produk olah ikan segar maupun kering sangat potensial dikembangkan mengingat dengan beroperasinya pelabuhan akan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut diharapkan dapat disediakan oleh masyarakat lokal sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Penentuan dan Pemilihan Mata Pencaharian Alternatif

Berikut disajikan hasil skoring dan pembobotan mata pencaharian yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Skoring dan Pembobotan Mata Pencaharian

No.	Bidang Usaha & Potensi Mata Pencaharian Alternatif	Pertimbangan Teknis-Non Teknis & Bobot					Bobot x Skor
		Ketersediaan Bahan Baku (40%)	Minat Masyarakat (20%)	Ketersediaan Tenaga Kerja (10%)	Penguasaan Teknologi (10%)	Ketersediaan Pasar (20%)	
A	Wisata Bahari						
1	Usaha Penyewaan Pondok Wisata	4	3	3	3	3	340*
B	Perikanan Tangkap						
2	Rumponisasi	2	3	2	1	4	250
C	Budidaya Laut						
3	Pembesaran ikan bandeng dalam keramba jaring apung	2	2	2	1	3	210
4	Pembesaran ikan nila dalam keramba jaring apung	2	2	2	1	3	210
5	Budidaya rumput laut	3	2	3	3	2	260
6	Penangkaran & pembesaran teripang dalam keramba jaring tancap	2	2	2	2	3	220
D	Perkebunan						
7	Sirih & pinang	3	2	3	3	3	280
8	Keladi & petatas	3	2	3	3	3	280
E	Pengolahan Hasil Perikanan						
9	Pembuatan ikan kering	4	3	3	3	3	340*
10	Pembuatan bakso ikan	4	2	2	2	2	280
11	Pembuatan ikan asap	4	3	3	3	3	340*
F	Usaha Kuliner						
12	Warung makan	4	2	3	3	2	300

Keterangan: rentang nilai 100-175 (tidak potensial); 176-250 (kurang potensial); 251-325 (cukup potensial); dan 326-400 (sangat potensial). Tanda (*) merupakan nilai tertinggi di analisis lebih lanjut sebagai calon mata pencaharian alternatif

Potensi mata pencaharian alternatif yang memiliki kriteria sangat potensial, selanjutnya dianalisis berdasarkan kelayakan usaha. Berdasarkan tabel 2 diatas, maka yang terpilih yakni pembangunan dan pengelolaan pondok wisata, pembuatan ikan kering dan pembuatan ikan asap. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan usaha terhadap mata pencaharian potensial yang terpilih tersebut. Analisis kelayakan bertujuan untuk mengetahui apakah usaha dilakukan masyarakat di kampung-kampung lokasi layak dikembangkan atau tidak. Untuk mengukur kelayakan ini digunakan parameter BCR, ROI, dan PP seperti terlihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Kelayakan Usaha Mata Pencaharian Alternatif Terpilih Per Tahun

No.	Komponen Analisis Usaha	Mata Pencaharian Alternatif		
		Pembuatan Ikan Asap	Penyewaan Pondok Wisata	Penangkapan Ikan dengan Rumponisasi
1	Investasi	4.595.000,-	49.048.000,-	18.800.000,-
2	Penerimaan	420.000.000,-	54.000.000,-	386.000.000,-
3	Biaya Variabel	177.570.000,-	11.575.000,-	158.520.000,-
4	Keuntungan	198.516.667,-	39.741.200,-	156.230.000,-
5	BC Ratio	3.70	2.64	1.62
6	ROI	90%	85%	58%
7	PP	0.04	2.17	2.32

Sumber: Data Olahan (2018)

a) Usaha Ikan Asap

Ikan asap merupakan salah satu usaha pengolahan ikan yang tergolong tradisional yang memiliki prospek yang cukup baik karena produksinya banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan (Randalinggi, 2013). Ikan asap juga dikenal sebagai ikan asar (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, 2017). Dari tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha ikan asap layak secara ekonomi, karena Net B/C > 1 (3.70), dengan laba bersih mencapai Rp. 198.516.667,- per tahun atau pendapatan per bulan Rp. 12.407.292,-. Investasi untuk usaha ikan asap juga tergolong cepat dapat mengembalikan modal/investasi karena Payback periodenya hanya 0.04.

b) Usaha Penyewaan Pondok Wisata

Usaha penyewaan pondok wisata dengan asumsi 3 buah pondok yang dilengkapi dengan fasilitas MCK sebanyak 2 unit. Lahan yang digunakan merupakan lahan tanah hak ulayat sehingga tidak perlu penyewaan tempat/lahan. Usaha penyewaan pondok wisata adalah salahsatu alternatif usaha yang berdasarkan kelayakan sosial, pasar dan teknis cukup menjanjikan, karena sumberdaya alam sebagai obyek wisata cukup melimpah, bahkan usaha ini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan sumberdaya pantai tetap lestari karena ada pengelolaan efektif. Usaha ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat Teluk Depapre, ketika kegiatan nelayan dalam menangkap ikan di dalam teluk nanti tidak memungkinkan lagi akibat adanya aktifitas pelabuhan Depapre. Secara finansial, usaha ini juga sangat memungkinkan, dimana berdasarkan analisis finansial yakni kelayakan usaha, usaha ini termasuk kategori layak (Tabel 3). Dari Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha pariwisata dengan penyediaan jasa penyewaan pondok wisata layak secara ekonomi, karena Net B/C > 1 (2.64), dengan laba bersih mencapai Rp. 39.741.200,-per tahun atau pendapatan per bulan Rp. 3.311.767,-. Sayangnya memang investasi untuk pondok wisata tergolong lambat dalam dapat mengembalikan modal/investasi karena Payback Periodenya hanya 2.17, namun risikonya termasuk kecil.

c) Usaha Penangkapan Ikan dengan Rumponisasi

Usaha penangkapan merupakan mata pencaharian utama yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal secara turun-temurun di kawasan Teluk Depapre. Alat tangkap yang digunakan cukup sederhana, yakni dengan pancing dan jaring serta tombak. Perahu yang digunakan umumnya perahu dayung dan sebagian sudah menggunakan mesin Johnson (50 PK). Rumpon dapat menjadi salah satu solusi bagi nelayan di Teluk Depapre karena dapat mendekatkan jarak *fishing ground*, memperkecil biaya operasional nelayan, menjadi bank ikan yang lestari, dan produktivitas tangkapan meningkat. Oleh karena itu, kegiatan penangkapan ikan berbasis rumpon lebih efisiensi dan efektivitas dimana dapat memudahkan nelayan dalam mencari ikan.

Dari Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan dengan bantuan rumpon layak secara ekonomi, karena Net B/C > 1 (1,62), dengan laba bersih mencapai Rp. 156.230.000,- per tahun atau pendapatan per bulan Rp 9.764.375,-. Sayangnya memang investasi untuk usaha penangkapan ikan dengan bantuan rumpon tergolong lambat dalam dapat mengembalikan modal/investasi karena Payback periodenya hanya 2.32 dengan risiko termasuk besar.

Permasalahan dan Prospek Pengembangan

Berdasarkan hasil pengamatan, nelayan masyarakat local di Teluk Depapre masih dikategorikan sebagai neayan *subsisten*, dimana masih menggunakan alat tangkap yang masih sederhana. Beberapa mata pencaharian alternatif yang sudah mulai diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa masyarakat seperti budidaya ikan bandeng dan ikan nila

dalam keramba jaring tancap, namun masih sangat terkendala dengan ketersediaan bahan baku, yakni kesulitan akan ketersediaan bibit. Bibit yang selama ini didatangkan dari daerah lain seperti dari Koya Kota Jayapura, Makassar dan tempat lainnya membutuhkan biaya tidak sedikit. Selain itu, minat dan penguasaan teknologi juga masih sangat kurang sehingga perlu pelatihan dan pendampingan oleh stakeholder yang terkait, terutama oleh dinas terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Berikut pada Tabel 4 disajikan permasalahan dan alternatif pemecahannya berdasarkan tiga (3) jenis mata pencaharian yang terpilih.

Tabel 4. Isu dan Permasalahan

Jenis Mata Pencaharian	Permasalahan	Alternatif Pemecahan
Ikan Asap	Teknologi	Pelatihan teknik pengolahan dan pengelolaan usaha
	Modal	Bantuan modal melalui pinjaman lunak
	Etos kerja	Pelatihan dan penyuluhan
	Bahan baku (pada musim gelombang)	Diversifikasi produk olahan
Penyewaan Pondok Wisata	Bahan baku pembuatan pondok masih mahal	Pemanfaatan bahan baku lokal
	Pengelolaan usaha	Pelatihan usaha
Penangkapan Ikan dengan Bantuan Rumpon	Modal	Bantuan modal usaha dengan kredit lunak
	Etos kerja terkait tenaga kerja	Pelatihan dan penyuluhan
	Keahlian (<i>skill</i>)	Pelatihan
	Kelembagaan kelompok Pengelolaan	Pelatihan dan penyuluhan
	Armada penangkapan	Bantuan modal

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara (2017)

Secara detail, permasalahan pada setiap jenis usaha mata pencaharian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Ikan Asap

Usaha ikan asap telah lama dikenal di masyarakat nelayan, namun masih dikelola secara tradisional yang seringkali kurang memperhatikan mutu dan kualitas produk. Modal usaha ikan asap cukup besar pada biaya investasi dan pembelian bahan baku. Bahan baku seringkali sulit diperoleh sehingga harga yang diperoleh cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan selain karena etos kerja nelayan (khususnya masyarakat lokal), juga karena kondisi di laut yang relatif tidak memungkinkan pada saat musim gelombang.

2. Usaha Penyewaan Pondok Wisata

Kendala utama pada usaha penyewaan pondok wisata, yakni bahan baku pembangunan pondok yang cukup mahal, serta pengelolaan baik pelayanan maupun pengelolaan keuangan masih sangat kurang baik. Dalam pelayanan misalnya, berdasarkan pengalaman peneliti seringkali harga yang ditawarkan ke konsumen tidak sesuai dengan tarif dan kesepakatan awal, kenyamanan pengunjung belum menjadi perhatian pengelola wisata, serta minimnya fasilitas pendukung seperti toilet yang bersih dan lain-lain.

3. Penangkapan Ikan dengan Bantuan Rumpon

Diketahui bahwa modal yang dibutuhkan dalam pembuatan rumpon cukup besar, karena dipasang di laut lepas. Dibutuhkan skill yang cukup untuk merakit dan memasang rumpon di laut lepas. Selain itu, armada yang digunakan harus cukup memadai karena berada di laut lepas yang juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena usaha pengadaan rumpon yang cukup besar, maka disarankan dikelola secara berkelompok oleh karena itu perlu pembentukan kelompok bersama.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rasio pendapatan terhadap total biaya dari ketiga jenis mata pencaharian alternatif tersebut, maka rasio pendapatan tertinggi yakni usaha pembuatan ikan asap, kemudian usaha penyewaan pondok wisata, dan penangkapan ikan dengan bantuan rumpon. Berdasarkan efisiensi penggunaan investasi (ROI), maka usaha yang lebih efisien secara berturut-turut, yakni usaha ikan asap, usaha penyewaan pondok wisata, kemudian usaha penangkapan ikan dengan bantuan rumpon. Berdasarkan Payback Period (PP), yakni berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang lebih cepat dalam satu

tahun yakni tercepat usaha ikan asap, usaha penyewaan pondok wisata, dan terakhir usaha penangkapan ikan dengan bantuan rumpun.

B. Saran

Mengingat pentingnya mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di Teluk Depapre, khususnya masyarakat lokal, maka penelitian ini perlu dilanjutkan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada analisis finansial ketiga usaha tersebut dalam tingkat keuntungan serta bagaimana cara mengoptimalkan finansial agar tercapai tingkat keuntungan secara maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dibiayai oleh Marine Fellowship Program (MFP), yang merupakan program kerjasama antara Conservation Strategy Fund (CSF) dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB). Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim CSF, diantaranya Bapak Dr. Mubariq Ahmad (Direktur CSF Indonesia), Bapak Desta Cristy Pratama, M.Sc, Dr. Luky Adrianto (Dekan FPIK IPB), dan Dr. Taryono Kodiran (Mentor). Tim Penelitian ini juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kampung Waiya, Kepala Kampung Tablanusu, Kepala Kampung Tablasupa, Kepala Kampung Kendate yang telah memberikan ijin dan dukungannya dalam pengumpulan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto L. 2005. Kebijakan Pengelolaan Perikanan dan Wilayah Pesisir (Kumpulan Working Paper Tahun 2005). Un-published. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB. Bogor.
- Brown TC and Terry C. 1990. Daniel Scaling of Ratings: Concepts and Methods. USDA Forest Service September 1990 Research Paper RM-293.
- Brugere C., Holvet K, Allison E. 2008. *Livelihood Diversification in Coastal and Inland Fishing Communities: Misconceptions, Evidence and Implications for Fisheries Management*. Working Paper, Sustainable Fisheries Livelihood Programme (SFLP). Rome, FAO/DFID.
- Chambers R. 1994. Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22, 1437-1454
- Ireland C. 2004. *Alternative sustainable livelihoods for coastal communities: A review of experience and experience and guide to best practice*. Somerset: theDLgroup
- Kadariah LK and Gray C. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kusnadi. 2009. Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Lax J and Krug J. 2013. Livelihood Assessment A participatory tool for natural resource dependent communities. Thünen Working Paper 7.
- Noveria M dan Malamassam MA. 2015. Penciptaan Mata Pencaharian Alternatif: Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Perlindungan Sumber Daya Laut (Studi Kasus Kota Batam dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 10 No. 2 Desember 2015 Hal. 139-150
- Randalinggi L. 2013. Kajian Kelayakan Mutu Usaha Pengolahan Cakalang Asap Berdasarkan GMP dan SSOP Serta Strategi Pengembangannya di Kota Jayapura. Tugas Akhir Program Magister (TPAM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Jakarta.
- Tobey J. 2003. Coastal management and poverty alleviation, dalam S.B. Olsen (ed). *Crafting coastal governance in a changing world*. Coastal Management Report No. 2241. Rhode Island: Coastal Resource Management Program.